BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Penelitian Terdahulu

Pada hakikatnya penelitian terdahulu merupakan suatu referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	**Firman Fernando, UNPAD 2014** "Pembingkaian Peristiwa Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilu Legislatif 2014 di Majalah Berita Mingguan Tempo dan Gatra (Analisis *Framing* Zhondang Pan Dan Gerald M. Kosicki Mengenai Pembingkaian Peristiwa Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilu Legislatif 2014 di Majalah Berita Mingguan Tempo Edisi 14-20 April 2014 dan Gatra Edisi 10-16 April 2014)."	- Pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing*. - Objek Penelitian yang diteliti adalah pemberitaan di media cetak (Majalah).	- Pada berita yang dianalisis oleh Firman Fernando tentang Pembingkaian Peristiwa Kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Pemilu Legislatif 2014, sedangkan peneliti pemberitaan kasus korupsi e-KTP. - Pada desain penelitian menggunakan konsep dari Zhondang Pan Dan Gerald M. Kosicki, sedangkan peneliti menggunakan konsep Robert M. Entman.
2	**Mercyella Daeng Kanang, UNPAD 2015** "Pemberitaan Konflik KPK - Polri di Majalah	- Pendekatan kualitatif dengan metode analisis	- Pada berita yang dianalisis oleh Merclyella tentang Pemberitaan Konflik

	Tempo dan Detik (Analisis *Framing* Robert M.Entman Mengenai Pemberitaan Konflik KPK - Polri di Majalah Tempo dan Detik Edisi 26 Januari-1 Februari 2015).*"*	*framing.* - Pada desain penelitian menggunakan konsep dari Robert M. Entman. - Objek Penelitian yang diteliti adalah pemberitaan di media cetak (Majalah).	KPK-Polri, sedangkan peneliti menganalisis pemberitaan kasus korupsi e-KTP.
3	**Agung Raharja, UNIKOM 2015** "Pembingkaian Berita Wakil Ketua Non Aktif Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto (Analisis *Framing* Robert M. Entman Pada Harian Pagi Tribun Jabar dan Harian Umum Pikiran Rakyat Edisi 4 Februari 2015)."	- Pendekatan kualitatif dengan metode analisis *framing.* - Pada desain penelitian menggunakan konsep dari Robert M. Entman.	- Pada berita yang dianalisis oleh Agung tentang pemberitaan kekisruhan pemberitaan KPK POLRI yang melibatan Bambang Widjojanto atas kasus kesaksian palsu pada Pemilukada Kotawaringin, Kalimantan Tengah, sedangkan peneliti menganalisis pemberitaan kasus korupsi e-KTP. - Objek peneliti yang digunakan oleh Agung Raharja media cetak koran sedangkan peneliti menggunakan media cetak majalah.

Sumber: Peneliti, 2017

2.1.2. Tinjauan Tentang Komunikasi

Komunikasi adalah topik yang amat sering diperbincangkan di berbagai kalangan, sehingga kata komunikasi itu sendiri memiliki terlalu banyak arti yang berlainan. Kata komunikasi atau *communication* dalam bahasa inggris berasal dari bahasa Latin *communis* yang berarti sama,

communico, *communicatio*, atau *communicare* yang berarti "membuat sama" (*to make common*). Istilah pertama (*communis*) paling sering disebut sebagai asal kata komunikasi, yang merupakan akar dari kata-kata Latin lainnya. Komunikasi menyarankan bahwa suatu pikiran, makna atau pesan dianut secara sama. (Deddy Mulyana, 2007: 45-46).

Banyak definisi komunikasi diungkapkan oleh para ahli dan pakar komunikasi seperti yang diungkapkan oleh Carl. I. Hovland yang dikutip oleh Onong Uchana Effendy dalam buku Ilmu Komunikasi teori dan Praktek, ilmu komunikasi adalah Upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. (Effendy, 2003:10).

Hovland juga mengungkapkan bahwa yang dijadikan objek studi ilmu komunikasi bukan hanya penyampaian informasi melainkan juga pembentukan pendapat umum (*Public Opinion*) dan sikap publik (*public attitude*) yang dalam kehidupan sosial dan kehidupan politik memainkan peranan yang amat penting. Dalam pengertian khusus komunikasi, Hovland yang dikutip dari Onong Uchana Effendy dalam buku Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek mengatakan bahwa komunikasi adalah proses mengubah perilaku orang lain (*communication is the procces to modify the behaviour* of *other individuals*). Jadi, dalam berkomunikasi bukan sekedar memberitahu, tetapi juga berupaya mempengaruhi agar seseorang atau sejumlah orang melakukan kegiatan atau tindakan yang diinginkan oleh komunikator, akan tetapi seseorang akan dapat mengubah sikap pendapat atau perilaku orang lain, hal

ini bisa terjadi apabila komunikasi yang disampaikan bersifat komunikatif yaitu komunikator dalam menyampaikan pesan-pesan harus benar-benar dimengerti dan dipahami oleh komunikan untuk mencapai tujuan komunikasi yang komunikatif. (Effendy, 2003:10).

2.1.3. Tinjauan Tentang Komunikasi Massa

Definisi Komunikasi massa menurut Bittner seperti dikutip oleh Jalaluddin Rakhmat *"mass communication is messages communicated through a mass medium to a large number of people"* (komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang). Dapat disimpulkan bahwa komunikasi massa adalah salah satu bentuk penyampian pesan dengan menggunakan media. Komunikator hanya menyampaikan pesan tanpa melalui siap dan golongan mana pesan tersebut diterima dan ada kalanya proses komunikasi terjadi dengan menggunakan media. (Rakhmat, 2015:3)

Pada dasarnya komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa (media cetak dan elektronik). Sebelum melangkah secara luas tentang komunikasi massa perlu diketahui arti komunikasi itu sendiri secara estimologi dikatakan bahwa Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari bahasa latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti samera. Sama disini maksudnya adalah sama makna. (Effendy, 2003:9).

2.1.4. Tinjauan Media Massa

Elvinaro mengatakan, media massa pada dasarnya dapat menjadi dua kategori, yakni media massa cetak dan media elektronik. Media cetak yang dapat memenuhi kriteria sebagai media massa adalah surat kabar dan majalah, sedangkan media massa elektronik meliputi televisi, radio siaran film dan media *on-line*. (Ardianto, 2015:103).

Sebuah media bisa disebut media massa jika memiliki karakteristik tertentu. Karakteristik Media massa menurut Cangara (2006) antara lain:

1. Bersifat melembaga, artinya pihak yang mengelola media terdiri dari banyak orang, yakni mulai dari pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi.
2. Bersifat satu arah, artinya komunikasi yang dilakukan kurang memungkinkan terjadinya dialog antara pengirim dan penerima. Kalau pun terjadi reaksi atau umpan balik, biasanya memerlukan waktu dan tertunda.
3. Meluas dan serempak, artinya dapat mengatasi rintangan waktu dan jarak, karena ia memiliki kecepatan. Bergerak secara luas dan simultan, dimana informasi yang disampaikan diterima oleh banyak orang dalam waktu yang sama.
4. Memakai peralatan teknis atau mekanis, seperti radio, televisi, surat kabar, dan semacamnya.

5. Bersifat terbuka, artinya pesannya dapat diterima oleh siapa saja dan dimana saja tanpa mengenal batas usia, jenis kelamin, dan suku bangsa. (Cangara, 2006:140-141).

2.1.5. Majalah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), majalah didefinisikan sebagai:

> "Terbitan berkala yang isinya meliputi berbagai liputan jurnalistik, informasi yang patut diketahui oleh konsumen pembaca, artikel, sastra dan sebagainya yang menurut kala terbitnya dibedakan atas majalah bulanan, majalah tengah bulan, majalah mingguan dan sebagainya dan menurut pengkhususan isinya dibedakan atas majalah berita, wanita, remaja, olahraga, sastra, ilmu pengetahuan tertentu, dan sebagainya."

Adapun beberapa ahli mendefinisikan majalah sebagai kumpulan berita, artikel, cerita, iklan dan sebagainya, yang dicetak dalam lembaran kertas ukuran kuarto atau folio dan dijilid dalam bentuk buku, serta diterbitkan secara berkala. Perbedaan majalah dan koran terletak pada penerbitannya. Koran penerbitan berkalanya adalah setiap hari, maka dalam majalah penerbitannya bias seminggu sekali, sebulan sekali, atau tiga bulan sekali.

Dalam (Effendy, 2003:203) majalah sendiri memiliki sifat khusus yaitu:

1. Terekam, berita yang disiarkan majalah tersusun dalam alinea, kalimat dan kata-kata yang terdiri dari huruf-huruf yang tercetak pada kertas. Setiap peristiwa atau hal-hal lain yang diberitakan terekam sedemikian

rupa, sehingga dapat dibaca setiap saat dan dikaji ulang, didokumentasi, atau menjadi barang bukti tertentu.

2. Menggunakan perangkat mental secara aktif, karena pembaca majalah tidak seperti pendengar radio atau televisi yang hanya tinggal mendengarkan atau melihat apa yang disajikan oleh keduanya. Pembaca majalah hanya menggunakan huruf-huruf yang tercetak di atas kertas.

2.1.5.1 Kategorisasi Majalah

Tipe suatu majalah ditentukan oleh sasaran khalayak yang dituju. Artinya, sejak awal redaksi sudah menentukan siapa yang akan menjadi pembacanya, apakah anak-anak, remaja, wanita dewasa, pria dewasa atau untuk pembaca umum dari remaja sampai dewasa. Bisa juga majalah mempunyai sasaran pembaca dengan profesi tertentu seperti pelaku bisnis, atau pembaca dengan kegemaran tertentu seperti gemar bertani, beternak dan memasak.

Majalah-majalah yang terbit pada masa orde baru dapat dikategorisasikan sebagai berikut (Ardianto, 2015:119-120):

1. Majalah Berita: Tempo, Gatra
2. Majalah Keluarga: Ayahbunda, Famili
3. Majalah Wanita: Femina, Kartini, Sarinah
4. Majalah Pria: Matra
5. Majalah Remaja Wanita: Gadis, Kawanku
6. Majalah Remaja Pria: Hai

7. Majalah Anak-anak: Bobo, Ganesha
8. Majalah Ilmiah Populer: Prisma
9. Majalah Umum: Intisari, Warnasari
10. Majalah Hukum: Forum Keadilan
11. Majalah Pertanian: Trubus
12. Majalah Humor: Humor
13. Majalah Olahraga: Sportif, Raket
14. Majalah Berbahasa Daerah: Mangle (Sunda, Bandung), Djaka Lodang (Jawa, Yogyakarta)

Mengacu pada sasaran khalayaknya yang spesifik, maka fungsi utama suatu majalah berbeda satu dengan yang lainnya. Majalah berita seperti Tempo dan Gatra lebih berfungsi sebagai media informasi tentang berbagai peristiwa dalam dan luar negeri. Majalah wanita dewasa, meskipun isinya relatif menyangkut berbagai informasi dan tips masalah kewanitaan, lebih bersifat menghibur. Fungsi informasi dan mendidik mungkin menjadi prioritas berikutnya. Majalah pertanian, Trubus, fungsi utamanya adalah memberikan pendidikan mengenai cara bercocok tanam dan memberikan informasi mengenai dunia seputar pertanian dan agrobisnis.

2.1.5.2 Karakteristik Majalah

Majalah merupakan media yang paling simpel organisasinya, relatif lebih mudah mengelolanya. Elvinaro Ardianto dan kawan-kawan

dalam bukunya yang berjudul "Komunikasi Massa Suatu Pengantar" mengatakan bahwa karakteristik majalah adalah :

1. Penyajian lebih dalam, Berita-berita dalam majalah disajikan lebih lengkap, karena dibubuhi latar belakang peristiwa. Unsur *Why* dikemukakan secara lengkap, peristiwanya atau proses terjadinya peristiwa (unsur *how*) dikemukakan secara kronologis.
2. Nilai aktualitas lebih lama, Apabila nilai aktualitas surat kabar hanya berumur satu hari, maka nilai aktualitas majalah bisa satu minggu.
3. Gambar atau foto lebih banyak, Jumlah halaman majalah lebih banyak, sehingga selain penyajian beritanya yang lebih mendalam, majalah juga dapat menampilkan gambar atau foto yang lengkap. Foto-foto yang ditampilkan majalah memilki daya tarik tersendiri, apalagi bila foto tersebut sifatnya ekslusif.
4. Sampul (*Cover*), Disamping foto, sampul (*cover)* majalah juga merupakan penarik tersendiri. Menarik tidaknya *cover* suatu majalah sangat bergantung pada tipe majalahnya, pada intinya dapat dikemukakan bahwa *cover* merupakan salah satu faktor yang menarik suatu majalah yang menunjukan ciri majalah tersebut. (Ardianto, 2015:121-123).

2.1.6. Berita

William S. Maulsby. Dalam *Getting the News* ia menegaskan, berita bisa didefinisikan sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak

dari fakta-fakta yang mempunyai arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian para pembaca surat kabar yang memuat berita tersebut. (Sumadiria, 2005:64).

Dalam definisi jurnalistik, seperti dikutip Assegaff dikatakan, berita adalah laporan tentang fakta atau ide yang termasa, yang dipilih oleh staf redaksi suatu harian untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca, entah karena dia luar biasa, entah karena penting atau akibatnya, entah pula karena dia mencakup segi-segi *human interest* seperti humor, emosi, dan ketegangan. Menurut Sumandiria sendiri, berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan ataun penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media *on live* internet. (Sumadiria, 2005:64-65).

2.1.6.1 Jenis Berita

Jenis-jenis berita yang dikenal dalam dunia jurnalistik menurut Sumadiria (2005:68-71) antara lain:

1. *Straight news report,* adalah laporan langsung mengenai suatu peristiwa.
2. *Depth news report*, reporter menghimpun informasi dengan fakta-fakta mengenai peristiwa itu sendiri sebagai informasi tambahan untuk peristiwa tersebut.
3. *Comprehensive* merupakan laporan tentang fakta yang bersifat menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek.

4. *Interpretative report*, biasanya memfokuskan sebuah isu, masalah, atau peristiwa-peristiwa kontroversial.
5. *Feature story*, penulis mencari fakta yang menarik perhatian pembacanya.
6. *Depth reporting* adalah pelaporan jurnalistk yang bersifat mendalam, tajam, lengkap, dan utuh tentang suatu peristiwafenomenal atau aktual.
7. *Investigative reporting*, para wartawan melakukan penyelidikan untuk memperoleh fakta yang tersembunyi demi suatu tujuan. Biasanya pelaksanaannya sering ilegal atau tidak etis.
8. *Editorial writing* adalah penyajian fakta dan opini yang menafsirkan berita-berita yang penting dan memengaruhi pendapat umum.

2.1.6.2 Nilai Berita

Eriyanto (2002:106-107), menjelaskan nilai-nilai berita menentukan bukan hanya peristiwa apa saja yang akan diberitakan, melainkan juga bagaimana peristiwa tersebut dikemas. Ini merupakan prosedur awal dari bagaimana peristiwa dikontruksi. Ukuran-ukuran yang dipakai untuk memilih sebuah realitas peristiwa oleh wartawan adalah ukuran profesional yang dinamakan sebagai nilai berita. Secara umum, nilai berita tersebut dapat di gambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.2

Nilai-Nilai Berita

Prominance	Nilai berita diukur dari kebesaran peristiwanya atau arti pentingnya. Peristiwa yang diberikan adalah peristiwa yang dipandang penting. Kecelakaan yang menewaskan satu orang bukanlah berita, tetapi kecelakaan yang menewaskan satu bus baru berita. Atau kecelakaan pesawat terbang dipandang sebagai sebuah berita dibandingkan dengan kecelakaan pengendara sepeda motor.
Human Interest	Peristiwa lebih memungkinkan disebut berita kalau peristiwa itu lebih mengandung unsur haru, sedih dan menguras emosi khalayak. Peristiwa abang becak yang mengayuh dari Surabaya ke Jakarta lebih memungkinkan dipandang berita dibandingkan peristiwa abang becak yang mengayuh di Surabaya saja.
Conflict/Controversy	Peristiwa yang mengandung konflik lebih potensial disebut berita dibandingkan dengan peristiwa yang biasa-biasa saja. Peristiwa kerusuhan antar penduduk pribumi dengan Cina lebih layak disebut berita dibandingkan peristiwa sehari-hari antar penduduk pribumi.
Unusual	Berita peristiwa yang mengandung tidak biasa, peristiwa yang jarang terjadi. Seorang melahirkan 6 bayi dengan selamat lebih disebut berita dibandingkan dengan peristiwa kelahiran seorang bayi saja.
Proximity	*Proximity* Peristiwa yang dekat lebih layak diberitakan dibandingkan dengan peristiwa yang jauh, baik dari fisik maupun emosional dengan khalayak.

Sumber: Eriyanto. 2002. Analisis Framing: Kontruksi, ideologi dan politik media. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.

Daftar nilai berita itu hanya ingin menunjukan bagaimana peristiwa yang begitu banyak tiap hari, yang terjadi hampir setiap saat, diseleksi dengan memaknai prosedur tertentu. Sehingga dapat menentukan apa saja yang layak dan apa yang bisa disebut dengan berita. Nilai berita

membatasi, bahwa tidak semua peristiwa dapat diangkat dan disebut dengan berita. Peristiwa yang layak dan dapat disebut berita mengacu pada nilai berita, maka peristiwa tersebut adalah peristiwa yang negatif, konflik, jarang terjadi, atau peristiwa yang tidak umum.

Semakin penting, semakin jarang dang semakin berkaitan peristiwa tersebut dengan khalayak, maka semakin dapat dianggap sebagai berita, dan semakin aneh, unik, dan jarang peristiwa tersebut maka semakin kuat kuat kemngkinannya disebut sebagai berita. Semua proses ini berkaitan dengan proses produksi berita, nilai-nilai dalam kerja rutinitas organisasi berita ini terinternalisasi dan menjadi bagian penting dari kesadaran wartawan.

2.1.6.3 Unsur Berita

Dalam membuat sebuah berita yang baik terdapat unsur-unsur sebuah berita, dimana unsur berita tersebut adalah sebuah rumus dasar dalam setiap pembuatan sebuah nilai berita. Unsur yang perlu diperhatikan adalah *what* (apa), *who* (siapa), *where* (dimana), *when* (kapan), *why* (mengapa), dan *how* (bagaimana). Rumus dasar pembuatan berita ini sering disebut dengan 5W dan 1H, berikut tabel gambaran pengertiannya:

Tabel 2.3

Unsur Berita 5W dan 1H

What (Apa)	Untuk mengetahui tentang berita apa yang akan ditulis, tema apa yang akan diangkat dalam berita, atau hal apa yang akan dibahas dalam berita tersebut.
Who (Siapa)	Untuk mengetahui siapa tokoh yang menjadi tokoh utama di *what*. Unsur siapa selalu menarik perhatian pembaca. Unsur Siapa ini harus

	dijelaskan dengan menunjukkan ciri-cirinya seperti nama, umur, pekerjaan, alamat serta atribut lainnya berupa gelar (bangsawan, suku, pendidikan) pangkat/jabatan.
Where (Dimana)	Untuk mengetahui lokasi kejadian peristiwa (dimana) atau tempat berlangsungnya peristiwa tersebut.
When (Kapan)	Untuk mengetahui waktu peristiwa itu terjadi.
Why (Mengapa)	Untuk mengetahui alasan mengapa peristiwa itu bisa terjadi.
How (Bagaimana)	Untuk menggambarkan suasana dan proses peristiwa terjadi.

Sumber: Peneliti 2017

Unsur ini adalah untuk mengetahui dengan tepat apa yang akan disiarkan atau disampaikan dalam bentuk berita. Sehingga unsur berita merupakan bagian paling penting dalam menyajikan dasar sebuah pemberitaan.

2.1.6.4 Struktur Berita

Susunan atau struktur berita, khususnya dalam berita langsung, pada umumnya mengacu pada struktur piramida terbalik, yaitu memulai penulisan berita dengan mengemukakan bagian berita yang dianggap paling penting, kemudian diikuti bagian-bagian yang dianggap agak penting, kurang penting, dan seterusnya. Susunan berita bentuk piramida terbalik ini menguntungkan pembaca dalam hal efisiensi waktu karena langsung mengetahui berita paling penting. Karenanya, bentuk ini bisa lebih menarik perhatian pembaca.

2.1.6.5 *Feature*

Menurut Mappatoto (1999) dalam buku Haris Sumadiria yang berjudul “Jurnalistik Indonesia” menyebutkan bahwa:

> *"Feature news* adalah artikel yang kreatif, kadang-kadang subjektif, yang dirancang terutama untuk menghibur dan memberitahu pembaca tentang peristiwa, situasi, atau aspek kehidupan." (Sumadiria, 2005:152).

Meskipun *Feature news* merupakan berita yang dirancang untuk menghibur khalayak, namun dalam penulisannya tetap memperhatikan nilai-nilai suatu berita. Karena, pada dasarnya berita yang di-*feature*-kan adalah berita yang ditulis dengan lebih menekankan pada unsur human interest, jadi nilai-nilai berita dan unsur lainnya yang terkandung dalam suatu berita tetap ada dalam suatu *feature news.*

2.1.6.6 Karakteristik *Feature*

Tulisan yang berupa berita disebut *feature news,* adapun cirri-ciri *feature news,* diantaranya:

1. Bukan berita dalam arti yang biasa, tetapi berita yang "di-*feature*-kan" berita-berita dalam golongan ini seperti berita hari kedua (sidebars) dalam ketergantungannya pada peristiwa-peristiwa yang aktual. *Feature news* bukan sekedar berita faktual, melainkan berita yang dibuat menarik dengan dibubuhi unsur sentuhan manusia. Artinya, bukan karena berita itu penting, melainkan karena berita itu ditulis menarik.
2. Penulisan *feature news* ditekankan pada maksud berkisar pada salah satu "emosi" kita, misalnya untuk menimbulkan rasa sedih, rasa heran, takjub, geli, jengkel, rasa senang dan sebagainya. (Kusumaningrat, 2005:219,222).

Dari dua ciri di atas dapat diartikan bahwa *feature news* menarik dalam arti kata tulisan yang berkenaan dengan sesuatu berita diolah sedemikian rupa sehingga titik beratnya bukan pada berita itu sendiri tetapi pada cara berita itu disajikan. Dengan kata lain: Titik beratnya bukan pada "*event*nya" tetapi bagaimana cara "melukiskannya" (tekanan pada keadaan, bukan pada kejadiannya). Karena titik beratnya bukan pada beritanya, maka *features news* bisa merupakan suatu tulisan yang berasal dari berita yang kurang menarik.

2.1.7 Tinjauan Tentang E-KTP

E-KTP atau KTP Elektronik adalah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan/pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis pada database kependudukan nasional. Penduduk hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP yang tercantum Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK merupakan identitas tunggal setiap penduduk dan berlaku seumur hidup, nomor NIK yang ada di e-KTP nantinya akan dijadikan dasar dalam penerbitan Paspor, Surat Izin Mengemudi (SIM), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Polis Asuransi, Sertifikat atas Hak Tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya (Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Adminduk) Autentikasi Kartu Identitas (e-ID) biasanya menggunakan biometrik yaitu verifikasi dan validasi sistem melalui pengenalan karakteristik fisik atau tingkah laku manusia. Ada banyak jenis pengamanan dengan cara ini, antara lain sidik jari (*fingerprint*), retina mata,

DNA, bentuk wajah, dan bentuk gigi. Pada e-KTP, yang digunakan adalah sidik jari.

Penggunaan sidik jari e-KTP lebih canggih dari yang selama ini telah diterapkan untuk SIM (Surat Izin Mengemudi). Sidik jari tidak sekedar dicetak dalam bentuk gambar (format jpeg) seperti di SIM, tetapi juga dapat dikenali melalui chip yang terpasang di kartu. Data yang disimpan di kartu tersebut telah dienkripsi dengan algoritma kriptografi tertentu. Proses pengambilan sidik jari dari penduduk sampai dapat dikenali dari chip kartu adalah sebagai berikut:

Sidik jari yang direkam dari setiap wajib KTP adalah seluruh jari (berjumlah sepuluh), tetapi yang dimasukkan datanya dalam *chip* hanya dua jari, yaitu jempol dan telunjuk kanan. Sidik jari dipilih sebagai autentikasi untuk e-KTP karena alasan berikut:

1. Biaya paling murah, lebih ekonomis daripada biometrik yang lain.
2. Bentuk dapat dijaga tidak berubah karena gurat-gurat sidik jari akan kembali ke bentuk semula.
3. Unik, tidak ada kemungkinan sama walaupun orang kembar.

Informasi penduduk yang dicantumkan dalam e-KTP ditunjukkan pada *layout* kasar berikut:

1. Nama
2. Tempat/Tgl Lahir
3. Jenis Kelamin
4. Alamat (RT/RW, Kel/Desa, Kecamatan)

5. Agama
6. Status Pekerjaan
7. Kewarganegaraan
8. Berlaku Hingga
9. Foto
10. Tanda Tangan
11. NIK

Untuk mendapatkan informasi di atas dari penduduk, wajib KTP harus mengisi formulir. Selain tujuan yang hendak dicapai, manfaat e-KTP diharapkan dapat dirasakan sebagai berikut:

1. Identitas jati diri tunggal
2. Tidak dapat dipalsukan
3. Tidak dapat digandakan
4. Dapat dipakai sebagai kartu suara dalam pemilu atau pilkada

Struktur e-KTP terdiri dari sembilan layer yang akan meningkatkan pengamanan dari KTP konvensional. *Chip* ditanam di antara plastik putih dan transparan pada dua *layer* teratas (dilihat dari depan). *Chip* ini memiliki antena didalamnya yang akan mengeluarkan gelombang jika digesek. Gelombang inilah yang akan dikenali oleh alat pendeteksi e-KTP sehingga dapat diketahui apakah KTP tersebut berada di tangan orang yang benar atau tidak. Untuk menciptakan e-KTP dengan sembilan *layer*, tahap pembuatannya cukup banyak, diantaranya:

1. *Hole punching*, yaitu melubangi kartu sebagai tempat meletakkan *chip*

2. *Pick and pressure*, yaitu menempatkan *chip* di kartu
3. *Implanter*, yaitu pemasangan antenna (pola melingkar berulang menyerupai spiral)
4. *Printing*, yaitu pencetakan kartu
5. *Spot welding*, yaitu pengepresan kartu dengan aliran listrik
6. Laminating, yaitu penutupan kartu dengan plastik pengaman

e-KTP dilindungi dengan keamanan pencetakan seperti *relief text*, *microtext*, *filter image*, *invisible ink* dan warna yang berpendar di bawah sinar *ultra violet* serta anti *copy design*. Penyimpanan data di dalam *chip* sesuai dengan standar internasional NISTIR 7123 dan *Machine Readable Travel Documents* ICAO 9303 serta EU *Passport Specification* 2006. Bentuk KTP elektronik sesuai dengan ISO 7810 dengan *form factor* ukuran kartu kredit yaitu 53,98 mm x 85,60 mm.

Kini pemerintah dengan segala usahanya agar seluruh rakyat Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau pernah menikah supaya memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pemerintah kini memberikan pelayanan pada masyarakat untuk membuat e-KTP secara gratis. Namun walaupun demikian masih ada juga masyarakat yang belum sadar arti pentingnya sebuah Kartu Identitas Diri atau e-KTP sehingga menreka enggan untuk datang ke kantor kelurahan untuk membuat Kartu Tanda penduduk (KTP).

Selain KTP yang kini sudah beredar umum di masyarakat, kini pemerintah berusaha membuat program baru yaitu dengan mengharuskan seluruh rakyat Indonesia di tahun 2012 memiliki e-KTP atau KTP Elektronik.

e-KTP atau KTP Elektronik fungsinya sama dengan KTP yang sudah umum, disini perbedaannya jika telah memiliki satu e-KTP seseorang tidak mungkin bisa membuat lagi menjadi dua e-KTP karena e-KTP sudah dilengkapi dengan sidik jari dan scan retina mata yang bertujuan agar tercipta data tunggal, yaitu setiap satu orang dengan satu identitas (KTP). Pemberlakuan e-KTP dimaksudkan untuk menertibkan administrasi orang perorang di Indonesia agar setiap identitas dan mobilitasnya tercatat dan terpantau secara jelas dan benar oleh negara. (http://www.e-ktp.com/2011/06/hello-world/, diakses tanggal 19 Mei 2017).

2.1.8. Tinjauan Tentang Korupsi

Pengertian korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi menurut buku yang menjadi reverensi bagi penulis pengertian korupsi sendiri yang juga dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008), Korupsi didefinisikan sebagai:

> "Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain."

Akan tetapi korupsi juga mempunyai beberapa macam jenis, menurut Beveniste dalam Djaja di dalam bukunya yang berjudul "Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi" korupsi didefenisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut:

1. *Discretionery corupption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijakan, sekalipun nampaknya bersifat

sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh: Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada ”calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.

2. *Illegal corupption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.
3. *Mercenery corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui

penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang ”sogok” atau ”semir” dalam jumlah tertentu.

4. Ideologi *corruption*, ialah jenis korupsi ilegal maupun *discretionery* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok. Contoh: Kasus skandal watergate adalah contoh *ideological corruption*, dimana sejumlah individu memberikan komitmen mereka terhadap presiden Nixon ketimbang kepada undang-undang atau hukum. Penjualan aset-aset BUMN untuk mendukung pemenangan pemilihan umum. (Djaja, 2008:23).

2.1.9. Tinjauan Pers

Pers atau *press* digunakan untuk merujuk semua kegiatan jurnalistik, terutama kegiatan yang berhubungan dengan menghimpun berita. Pers dan jurnalistik dapat diibaratkan sebagai jiwa dan raga. Pers berasal dari perkataan Belanda pers yang artinya menekan atau mengepres. Kata pers merupakan padanan dari kata *press* dalam bahasa Inggris yang juga berarti menekan atau mengepres. Secara harfiah kata pers atau *press* mengacu pada pengertian komunikasi yang dilakukan dengan perantaraan barang cetakan. Pers adalah aspek raga, karena ia berwujud, konkret dan nyata, sedangkan

jurnalistik adalah aspek jiwa, karena ia abstrak, merupakan kegiatan, dan menghidupi aspek pers.

Sumadiria dalam bukunya yang berjudul "Jurnalistik Indonesia" menjelaskan bahwa pers adalah:

> "Pers dalam arti sempit hanya merujuk kepada media cetak berkala: surat kabar, tabloid, dan majalah. Sedangkan dalam arti luas, pers bukan hanya menunjuk pada media cetak berkala melainkan juga mencakup media elektronik auditif dan media elektronik audiovisual barkala yakni radio, televisi, film dan media on line internet. Pers dalam arti luas disebut media massa." (Sumadiria, 2005:31).

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Pokok Pers No. 40/1999, yang terdapat di buku Sumadiria yang berjudul "Jurnalistik Indonesia" menyatakan bahwa pers adalah:

> "Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia." (Sumadiria, 2005:31).

Definisi di atas, bahwa Pers merupakan lembaga sosial sekaligus wahana komunikasi massa yang *out put*-nya berupa kegiatan jurnalistik yakni mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, memberikan gambaran yang sangat jelas dimana ada keterkaitan antara jurnalistik dan pers. Sebenarnya kaitan antara pers dan jurnalistik adalah pers sebagai lembaga atau organisasi yang menyebarkan berita sedangkan jurnalistik lebih kepada praktek atau kegiatan menyebarkan berita.

2.1.9.1 Fungsi Pers

Salah satu pakar komunikasi yang juga merupakan Dosen di Universitas Komputer Indonesia, Mahi M. Hikmat di dalam bukunya yang berjudul "Etika dan Hukum Pers" menjelaskan empat fungsi pers, yaitu:

1. Informatif

   Fungsi informatif yaitu memberikan informasi, atau berita kepada khalayak dengan cara yang teratur. Pers menghimpun beritayang dianggap berguna dan penting bagi orang banyak, kemudian menuliskanya dalam kata-kata, dan menyebarkanya ke publik. Setiap informasi yang disampaikan tentu harus memenuhi kriteria dasar suatu berita, yakni aktual, akurat, faktual, menarik atau penting, benar, lengkap-utuh, jelas, jernih, jujur, adil, berimbang, relevan, bermanfaat, etis, dan syarat berita lainnya. Dalam prinsip jurnalistik, syarat utama berita tersebut serring dirumuskan dalam 5W+1H (*what*, *who*, *where*, *when*, *why*, dan *how*). Sebuah berita atau informasi dianggap lengkap jika keenam pertanyaan tersebut sudah terjawab dengan komplit.

2. Mendidik

   Dalam konsep yang ideal, penyampaian informasi yang disebarluaskan pers dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat, khususnya pembaca, pendengar, atau penonton. Dalam konteks ini, fungsi pers mendidik bermakna bahwa pers harus menyampaikan informasi yang berperan positif dalam

mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan. Informasi yang disebarkan pers sejatinya memberikan dampak positif, baik pada ranah kognitif, afektif, maupun psiomotorik pembaca, pendengar, dan penonton.

Dengan fungsi ini pula, pers harus dapat berperan sebagai guru yang memberikan pencerahan terhadap muridnya (pembaca, pendengar, penonton). Pers setiap hari melaporkan berita, memberikan tinjauan atau analisis atas berbagai peristiwa dan kecendrungan yang terjadi, serta ikut berperan dalam mewariskan nilai-nilai luhur universal, nilai-nilai dasar nasional, dan kandungan budaya lokal dari satu generasi ke generasi berikutnya secara estafet.

3. Rekreasi/Penghibur

Fungsi pers yang ketiga lebih melekat pada media elektronik: radio dan televisi. Bahkan sebelum hadirnya televisi dan radio yang bervisi *news*, fungsi menghibur merupakan fungsi utama. Walaupun begitu bagi sebagian media besar elektronik, ampai saat ini fungsi menghibur tetap merupakan fungsi yang dominan. Bahkan kalau di persentasekan sebagian besar televisi dan radio menjalankan fungsi hiburannya di atas 80% dari 100% acara yang mereka tayangkan.

Fungsi ini memang mengamanatkan pers harus mampu memerakan dirinya sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan

sekaligus menyehatkan bagi semua lapisan masyarakat, khususnya bagi pembaca, pendengar atau penontonya. Dalam media cetak, fungsi menghibur ini pun dilakukan dengan memuat kisah-kisah dunia, baik yang nyata dalam bentuk *feature* atau fiksi berupa cerpen atau cerita beersambung, puisi, berita acara hiburan, berita seputar selebritis, humor, komik, dan lain sebagainya.

4. Kontrol Sosial

   Pers menjadi bagian yang memberikan kontribusi sesuai visinya membenarkan yang benar dan meluruskan yang salah. Pers berfungsi sebagai kontrol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini di beberapa Negara, seperti Indonesia, melahirkan pers sebagai lembaga kekuatan ke empat dalam konsep pemisahan kekuasaan dari *Montisque* atau dalam sistem pembagian kekuasaan seperti di Indonesia. Oleh karena itu, pers mendapat julukan *four estate*; pers adalah pilar demokrasi ke empat setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

   Dalam kerangka ini, kehadiran pers dimaksudkan untuk mengawasi atau mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif agar kekuasaan mereka tidak menjadi korup dan *absolute*. Di Negara-negara yang menganut paham demokrasi, pers mengemban fungsi sebagai pengawas pemerintah dan masyarakat (*watchdoug function*). Pers juga harus bersikap independen atau

menjaga jarak yang sama terhadap semua kelompok dan organisasi yang ada. (Hikmat, 2011:54-57).

Selain keempat fungsi utama pers tersebut, di jelaskan dalam buku Etika Hukum dan Pers oleh Mahi M. Hikmat (2011:7-59), masih terdapat fungsi-fungsi lain yang menjadi tambahan dalam konteks realitas yang dijalankan dengan baik oleh pers baik media cetak maupun elektronik. Fungsi-fungsi pers tambahan tersebut diantaranya:

1. Fungsi Ekonomi

   Kehadiran pers di banyak Negara ikut mendukung berjalannya roda perekonomian. Pers ikut mengambil bagian dari upaya ikut membangun ekonomi Negara dengan tampil sebagai perusahaan perusahaan yang memberikan kontribusi besar bagi perkembangan ekonomi suatu Negara. Misalnya dengan ikut menciptakan lapangan pekerjaan, pembayaran pajak dan kegiatan ekonomi lainya.

2. Fungsi Sosial

   Undang-undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyuratkan fungsi pers yang ada di Indonesia sebagai lembaga sosial. Hal itu dimainkan dengan melihat realitas yang selalu hadir di Indonesia akan bencana yang selalu hadir dan mengakibatkan rasa empati untuk kepada masyarakat lain. Sehingga banyak media cetak dan elektronik berlomba-lomba menyediakan, menampung dan menyalurkan setiap korban bencana dan kemiskinan yang didera

masayarakat yang terjadi, ternyata disikapi oleh insan pers Indonesia dengan kematangan fungsi sosial yang mereka perankan.

3. Fungsi Mediator

   Pers adalah lembaga media sehingga fungsi utama pers adalah sebagai mediator, dimana berfungsi sebagai penghubung atau fasilitator, dengan memediasi berbagai kepentingan dan berbagai elemen dalam masyarakat.

4. Fungsi Mempengaruhi

   Pers memiliki fungsi dapat mempengaruhi. Hal itu disadari lama dengan dibuktikannya banyak teori yang mengungkapkan kehebatan pers dalam mempengaruhi individu maupun kelompok. Pers memiliki mata pisau yang tajam untuk mengubah kognisi, afeksi dan psikomotorik individu atau kelompok, apalagi dengan era teknologi informasi yang makin canggih. Daya rangsang televisi dan internet dapat memberikan pengaruh besar terutama kepada anak-anak dan remaja yang belum memiliki daya *filter* yang kuat.

5. Fungsi Sejarah

   Dengan kekuatan tulisan atau siarannya. Pers berfungsi juga sebagai juru tulis terhadap fakta-fakta yang terjadi di masyarakat. Fakta adalah sebuah sejarah bagi kehidupan massa depan, sehingga catatan pers-pers masa lalu bermakna historis bagi masa kini dan catatan masa kini historis bagi masa depan. Bahkan, salah satu

sumber otentik bagi catatan sejarah bagi para sejarawan adalah pers.

2.1.9.2 Elemen-elemen jurnalisme

Ada sejumlah prinsip dalam jurnalisme, yang sepatutnya menjadi pegangan setiap jurnalis. Prinsip-prinsip ini telah melalui masa pasang dan surut. Namun, dalam perjalanan waktu, terbukti prinsip-prinsip itu tetap bertahan.

Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, dalam *journal The Elements of Journalism* 2001, merumuskan prinsip-prinsip itu dalam Sembilan Elemen Jurnalisme. Kesembilan elemen tersebut adalah:

1. **Kewajiban pertama jurnalisme adalah pada kebenaran**

   Kewajiban para jurnalis adalah menyampaikan kebenaran, sehingga masyarakat bisa memperoleh informasi yang mereka butuhkan untuk berdaulat. Bentuk "kebenaran jurnalistik" yang ingin dicapai ini bukan sekadar akurasi, namun merupakan bentuk kebenaran yang praktis dan fungsional. Ini bukan kebenaran mutlak atau filosofis. Tetapi, merupakan suatu proses menyortir (*sorting-out*) yang berkembang antara cerita awal, dan interaksi antara publik, sumber berita (*newsmaker*), dan jurnalis dalam waktu tertentu. Prinsip pertama jurnalisme pengejaran kebenaran, yang tanpa dilandasi kepentingan tertentu (*disinterested pursuit of truth*) adalah yang paling membedakannya dari bentuk komunikasi lain.

Contoh kebenaran fungsional, misalnya, polisi menangkap tersangka koruptor berdasarkan fakta yang diperoleh. Lalu kejaksaan membuat tuntutan dan tersangka itu diadili. Sesudah proses pengadilan, hakim memvonis, tersangka itu bersalah atau tidak-bersalah. Apakah si tersangka yang divonis itu mutlak bersalah atau mutlak tidak-bersalah? Kita memang tak bisa mencapai suatu kebenaran mutlak. Tetapi masyarakat kita, dalam konteks sosial yang ada, menerima proses pengadilan serta vonis bersalah atau tidak bersalah tersebut, karena memang hal itu diperlukan dan bisa dipraktikkan. Jurnalisme juga bekerja seperti itu.

2. Loyalitas pertama jurnalisme adalah kepada warga (*citizens*)

Organisasi pemberitaan dituntut melayani berbagai kepentingan konstituennya: lembaga komunitas, kelompok kepentingan lokal, perusahaan induk, pemilik saham, pengiklan, dan banyak kepentingan lain. Semua itu harus dipertimbangkan oleh organisasi pemberitaan yang sukses. Namun, kesetiaan pertama harus diberikan kepada warga (*citizens*). Ini adalah implikasi dari perjanjian dengan publik.

Komitmen kepada warga bukanlah egoisme profesional. Kesetiaan pada warga ini adalah makna dari independensi jurnalistik. Independensi adalah bebas dari semua kewajiban, kecuali kesetiaan terhadap kepentingan publik. Jadi, jurnalis yang

mengumpulkan berita tidak sama dengan karyawan perusahaan biasa, yang harus mendahulukan kepentingan majikannya. Jurnalis memiliki kewajiban sosial, yang dapat mengalahkan kepentingan langsung majikannya pada waktu-waktu tertentu, dan kewajiban ini justru adalah sumber keberhasilan finansial majikan mereka.

3. Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi

Perbedaan antara jurnalisme dengan hiburan (*entertainment*), propaganda, fiksi, atau seni, adalah disiplin verifikasi. Hiburan dan saudara sepupunya "*infotainment*" berfokus pada apa yang paling bisa memancing perhatian. Propaganda akan menyeleksi fakta atau merekayasa fakta, demi tujuan sebenarnya, yaitu persuasi dan manipulasi. Sedangkan jurnalisme berfokus utama pada apa yang terjadi, seperti apa adanya.

Disiplin verifikasi tercermin dalam praktik-praktik seperti mencari saksi-saksi peristiwa, membuka sebanyak mungkin sumber berita, dan meminta komentar dari banyak pihak. Disiplin verifikasi berfokus untuk menceritakan apa yang terjadi sebenar-benarnya. Dalam kaitan dengan apa yang sering disebut sebagai "obyektivitas" dalam jurnalisme, maka yang obyektif sebenarnya bukanlah jurnalisnya, tetapi metode yang digunakannya dalam meliput berita.

Ada sejumlah prinsip intelektual dalam ilmu peliputan: 1) Jangan menambah-nambahkan sesuatu yang tidak ada; 2) Jangan

mengecoh audiens; 3) Bersikaplah transparan sedapat mungkin tentang motif dan metode Anda; 4) Lebih mengandalkan pada liputan orisinal yang dilakukan sendiri; 5) Bersikap rendah hati, tidak menganggap diri paling tahu.

4. **Jurnalis harus tetap independen dari pihak yang mereka liput**

   Jurnalis harus tetap independen dari faksi-faksi. Independensi semangat dan pikiran harus dijaga wartawan yang bekerja di ranah opini, kritik, dan komentar. Jadi, yang harus lebih dipentingkan adalah independensi, bukan netralitas. Jurnalis yang menulis tajuk rencana atau opini, tidak bersikap netral. Namun, ia harus independen, dan kredibilitasnya terletak pada dedikasinya pada akurasi, verifikasi, kepentingan publik yang lebih besar, dan hasrat untuk memberi informasi. Adalah penting untuk menjaga semacam jarak personal, agar jurnalis dapat melihat segala sesuatu dengan jelas dan membuat penilaian independen. Sekarang ada kecenderungan media untuk menerapkan ketentuan "jarak" yang lebih ketat pada jurnalisnya. Misalnya, mereka tidak boleh menjadi pengurus partai politik atau konsultan politik politisi tertentu. Independensi dari faksi bukan berarti membantah adanya pengaruh pengalaman atau latar belakang si jurnalis, seperti dari segi ras, agama, ideologi, pendidikan, status sosial ekonomi, dan *gender*. Namun, pengaruh itu tidak boleh menjadi nomor satu. Peran sebagai jurnalislah yang harus didahulukan.

5. Jurnalis harus melayani sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan

Jurnalis harus bertindak sebagai pemantau independen terhadap kekuasaan. Wartawan tak sekedar memantau pemerintahan, tetapi semua lembaga kuat di masyarakat. Pers percaya dapat mengawasi dan mendorong para pemimpin agar mereka tidak melakukan hal-hal buruk, yaitu hal-hal yang tidak boleh mereka lakukan sebagai pejabat publik atau pihak yang menangani urusan publik. Jurnalis juga mengangkat suara pihak-pihak yang lemah, yang tak mampu bersuara sendiri.

Prinsip pemantauan ini sering disalahpahami, bahkan oleh kalangan jurnalis sendiri, dengan mengartikannya sebagai "mengganggu pihak yang menikmati kenyamanan." Prinsip pemantauan juga terancam oleh praktik penerapan yang berlebihan, atau "pengawasan" yang lebih bertujuan untuk memuaskan hasrat audiens pada sensasi, ketimbang untuk benar-benar melayani kepentingan umum. Namun, yang mungkin lebih berbahaya, adalah ancaman dari jenis baru konglomerasi korporasi, yang secara efektif mungkin menghancurkan independensi, yang mutlak dibutuhkan oleh pers untuk mewujudkan peran pemantauan mereka.

6. **Jurnalisme harus menyediakan forum bagi kritik maupun komentar dari publik**

   Apapun media yang digunakan, jurnalisme haruslah berfungsi menciptakan forum di mana publik diingatkan pada masalah-masalah yang benar-benar penting, sehingga mendorong warga untuk membuat penilaian dan mengambil sikap. Maka, jurnalisme harus menyediakan sebuah forum untuk kritik dan kompromi publik. Demokrasi pada akhirnya dibentuk atas kompromi. Forum ini dibangun berdasarkan prinsip-prinsip yang sama sebagaimana halnya dalam jurnalisme, yaitu: kejujuran, fakta, dan verifikasi. Forum yang tidak berlandaskan pada fakta akan gagal memberi informasi pada publik. Sebuah perdebatan yang melibatkan prasangka dan dugaan semata hanya akan mengipas kemarahan dan emosi warga. Perdebatan yang hanya mengangkat sisi-sisi ekstrem dari opini yang berkembang, tidaklah melayani publik tetapi sebaliknya justru mengabaikan publik. Forum ini harus mencakup seluruh bagian dari komunitas, bukan kalangan ekonomi kuat saja atau bagian demografis yang menarik sebagai sasaran iklan.

7. **Jurnalisme harus berupaya membuat hal yang penting itu menarik dan relevan**

   Tugas jurnalis adalah menemukan cara untuk membuat hal-hal yang penting menjadi menarik dan relevan untuk dibaca, didengar atau ditonton. Untuk setiap naskah berita, jurnalis harus

menemukan campuran yang tepat antara yang serius dan yang kurang-serius, dalam pemberitaan hari mana pun. Singkatnya, jurnalis harus memiliki tujuan yang jelas, yaitu menyediakan informasi yang dibutuhkan orang untuk memahami dunia, dan membuatnya bermakna, relevan, dan memikat. Dalam hal ini, terkadang ada godaan ke arah *infotainment* dan sensasionalisme.

8. **Jurnalis harus menjaga agar beritanya komprehensif dan proporsional**

   Jurnalisme itu seperti pembuatan peta modern. Ia menciptakan peta navigasi bagi warga untuk berlayar di dalam masyarakat. Maka jurnalis juga harus menjadikan berita yang dibuatnya proporsional dan komprehensif. Dengan mengumpamakan jurnalisme sebagai pembuatan peta, kita melihat bahwa proporsi dan komprehensivitas adalah kunci akurasi. Kita juga terbantu dalam memahami lebih baik ide keanekaragaman dalam berita.

9. **Jurnalis memiliki kewajiban untuk mengikuti suara nurani mereka**

   Setiap jurnalis, dari redaksi hingga dewan direksi, harus memiliki rasa etika dan tanggung jawab personal, atau sebuah panduan moral. Terlebih lagi, mereka punya tanggung jawab untuk menyuarakan sekuat-kuatnya nurani mereka dan membiarkan yang lain melakukan hal yang serupa. Agar hal ini bisa terwujud, keterbukaan redaksi adalah hal yang penting untuk memenuhi

semua prinsip jurnalistik. Gampangnya mereka yang bekerja di organisasi berita harus mengakui adanya kewajiban pribadi untuk bersikap beda atau menentang redaktur, pemilik, pengiklan, dan bahkan warga serta otoritas mapan, jika keadilan (*fairness*) dan akurasi mengharuskan mereka berbuat begitu. Dalam kaitan itu, pemilik media juga dituntut untuk melakukan hal yang sama. Organisasi pemberitaan, bahkan terlebih lagi dunia media yang terkonglomerasi dewasa ini, atau perusahaan induk mereka, perlu membangun budaya yang memupuk tanggung jawab individual. Para manajer juga harus bersedia mendengarkan, bukan cuma mengelola *problem* dan keprihatinan para jurnalisnya.

10. **Warga juga memiliki hak dan tanggung jawab dalam hal-hal yang terkait dengan berita.**

    Elemen terbaru ini muncul dengan perkembangan teknologi informasi, khususnya internet. Warga bukan lagi sekadar konsumen pasif dari media, tetapi mereka juga menciptakan media sendiri. Ini terlihat dari munculnya *blog*, jurnalisme *online*, jurnalisme warga (*citizen journalism*), jurnalisme komunitas (*community journalism*) dan media alternatif. Warga dapat menyumbangkan pemikiran, opini, berita, dan sebagainya, dan dengan demikian juga mendorong perkembangan jurnalisme.

2.1.9.3 Kode Etik Jurnalistik

Mahi M. Hikmat dalam bukunya yang berjudul "Etika dan Hukum Pers" menjelaskan tentang kode etik jurnalistik, Kode etik wartawan atau lebih populer dengan sebutan KEJ (Kode Etik Jurnalistik). Menurut Naungan Harahap (2007), kode etik adalah landasan moral bagi wartawan yang berisi kaidah penuntun serta pemberi arah tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya.

Penetapan pelanggaran KEJ berdasarkan penilaian Dewan Pers dan penjatuhan sanksi atas pelanggaran tersebut diberikan oleh organisasi kewartawan atau perusahaan per merupakan bukti KEJ berprinsip otonom. Pihak lain tidak diberikan "kesempatan" untuk menjatuhkan sanksi terhadap wartawan yang melanggar KEJ.

Kode etik yang berlaku bagi wartawan di suatu negara berlaku juga bagi wartawan di negara lain karena esensi dan prinsip-prinsip kode etik adalah bahwa berita pers harus berimbang, bersifat netral, objektif, akurat, faktual, tidak mencampuradukan fakta dan opini, tidak memasukan hal-hal yang bersifat pribadi (*privacy*), menghormati asas praduga tak bersalah, tidak bersifat fitnah, dusta, dan cabul, serta judul berita mencerminkan isi berita. Semua itu berlaku bagi semua wartawan di manapun berada.

Berlakunya KEJ yang baru unuk dilatarbelakangi perkembangan sangat pesat dalam kehidupan pers nasional selama era reformasi yang didorong lahirnya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pokok-

Pokok Kehidupan Pers di Indonesia. KEWI yang sempat disepakati oleh 26 organisasi wartawan di Bandung, 6 Agustus 1999 dinilai tidak *valid* dan masih perlu dilengkapi dengan menampung berbagai persoalan pers sesuai perkembangan tuntunan zaman, terutama makin meningkatnya jumlah media massa, baik media cetak maupun elektronik.

Pengesyahan KEJ-DP yang baru dinilai kalangan pers memiliki makna penting dalam perkembangan pers di Indonesia. Karena KEJ-DP merupakan produk asli Dewan Pers yang mendapat pengakuan luas dan disetujui oleh sebagian besar asosiasi wartawan cetak dan elektronik, Serikat Penerbit Pers (SPS), Asosiasi Televisi Seluruh Indonesia (ATVSI). Beberapa rumusan dan tafsiran KEJ memberikan dimensi baru untuk dunia pers. Salah satunya ikhwal menulis dan menyiarkan berita wartawan harus memiliki itikad baik atau sebaliknya tidak boleh beritikad buruk. Pasal 1 KEJ-DP berbunyi, "Wartawan Indonesia bersikap independen menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk." Rumusan ini memberikan payung perlindungan yang kuat, baik untuk pihak pers maupun untuk masyarakat luas.

2.1.10. Konglomerasi Media

Konglomerasi Media adalah penggabungan-penggabungan perusahaan media menjadi perusahaan yang lebih besar yang membawahi banyak media. Konglomerasi ini dilakukan dengan melakukan korporasi dengan perusahaan media lain yang dianggap mempunyai visi yang sama. Pembentukan konglomerasi ini dengan cara kepemilikan saham, *joint*

venture/*merger*, atau pendirian kartel komunikasi dalam skala besar baik integrasi vertikal, integrasi horisontal maupun kepentingan silang.

Konglomerasi di Indonesia menyebabkan satu orang dapat menguasai banyak media muncul, sehingga orang tersebut dapat mengendalikan berbagai media dalam satu waktu, dari kebijakan yang harus dianut, berita mana yang layak di publikasikan, nilai-nilai yang dianut dan sebagainya. Akibatnya jika media yang tergabung dalam satu group tertentu maka berita dan informasi yang disampaikan akan homogen. Selain itu berita yang disampaikah hanya berita yang dianggap menguntungan secara ekonomi. Akhirnya Pers tidak lagi dinilai dari seberapa besar nilai berita yang ada, tetapi berapa banyak keuntungan yang akan didapatkan dari pemuatan berita tersebut. Sebetulnya ini merupakan tanda-tanda bahwa regulasi atau peraturan yang mengatur tentang kepemilikan media tidak berjalan dengan baik. Padahal konglomerasi media berbahaya.

Di Indonesia konglomerasi dapat mempengaruhi kepentingan politik. Karena, suatu mmedia pada dasarnya tidak dapat berdiri sendiri. Dalam setiap media pasti ada kepentingan politik di dalamnya sikap media yang tidak netral dalam pemberitaan bisa terjadi dalam konglomerasi media.

Media menjadi sumber informasi bagi rakyat Indonesia. Bagi rakyat menengah keatas, mereka bisa mencari sumber informasi lain seperti internet atau cenderung mencari sisi lain dari sebuah pemberitaan.

Sedangkan bagi masyarakat menengah kebawah mereka cenderung tidak mencari sumber informasi alternatif. Sehingga, akan mudah mempercayai apa yang diberitakan dalam suatu media. Jika suatu edia memiliki kepentingan dalam suatu politik tertentu, maka media tersebut akan bersikap subjektif.

Dalam *framing* konglomerasi media memiliki dampak yang sangat besar. Berita yang ditayangkan harus menguntungka secara ekonomi dan scara politik bagi pihak yang berada d belakang media. Sehingga dalam suatu isu akan lebih memihak kepada suatu pihak sesuai dengan keinginan pemilik media. Akan ada pihak yang diframe seperti yang disudutkan atau yang disalahkan. Ada berita yang ditonjolkan dan ada berita yang mendapatkan alokasi lebih kecil sesuai dengan kepentingan pemilik media.

Seharusnya media bebas dalam memberitakan sesuatu tanpa tekanan dari siapapun. Sehingga informasi yang diberikan objektif dan masyarakat dapat mengetahui informasi dengan sebaik-baiknya. Dengan adanya konglomerasi, pemberitaan menjadi tidak objektif. Karena para pemilik media tersebut biasanya memihak suatu golongan dalam pemerintahan, sehingga masyarakat tidak mendapatkan suatu fakta secara utuh. Jika pemilik media mendukung seorang aktor politik maka medianya pun akan memberitakan pemberitaan yang baik tentang aktor tersebut dan akan menyembunyikan isu buruk tentang aktor itu. Dibalik itu, pemilik media tersebut juga mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan politik. berita dapat dipergunakan oleh aktor politik untuk mengenalkan dirinya

kepada khalayak. Karena persaingan dalam pasar politik yang sangat besar maka para elite politik terpaksa untuk memanfaatkan media massa. Oleh karena itu dalam pemberitaan politik selalu ada 2 sudut pandang yang berbeda. Ada isu yang lebih ditonjolkan oleh media.

2.1.11. Konstruksi Realitas Media Massa

Susbtansi teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas dari Berger dan Luckmann adalah pada proses simultan yang terjadi secara alamiah melalui bahasa dalam kehidupan sehari-hari pada sebuah komunitas primer dan semi sekunder. Basis sosial teori dan pendekatan ini adalah transisi-modern di Amerika pada sekitar tahun 1960-an, dimana media massa belum menjadi sebuah fenomena yang menarik untuk dibicarakan. Dengan demikian Berger dan Luckmann tidak memasukan media massa sebagai variabel atau fenomena yang berpengaruh dalam konstruksi sosial atas realitas.

Teori dan pendekatan konstruksi sosial atas realitas Peter L. Berger dan Luckman telah direvisi dengan melihat variabel atau fenomena media massa menjadi sangat substansi dalam proses eksternalisasi, subyektivasi, dan internalisasi inilah yang kemudian dikenal sebagai “konstruksi sosial media massa”. Substansi dari konstruksi sosial media massa ini adalah pada sirkulasi informasi yang cepat dan luas sehingga konstruksi sosial berlangsung dengan sangat cepat dan sebarannya merata. Realitas yang terkonstruksi itu juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori

dan opini massa cenderung sinis. Proses konstruksi sosial media massa melalui tahapan sebagai berikut:

1. Tahap menyiapkan materi konstruksi

   Menyiapkan materi konstruksi sosial media massa adalah tugas redaksi media massa, tugas itu didistribusikan pada desk editor yang ada di setiap media massa. Masing-masing media memiliki *desk* yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan visi suatu media. Isu-isu penting setiap hari menjadi fokus media massa, terutama yang berhubungan tiga hal yaitu kedudukan, harta, dan perempuan. Ada tiga hal penting dalam penyiapan materi konstruksi sosial yaitu:

   a. Keberpihakan media massa kepada kapitalisme.

      Sebagaimana diketahui, saat ini hampir tidak ada lagi media massa yang tidak dimiliki oleh kapitalis. Dalam arti kekuatan-kekuatan kapital untuk menjadikan media massa sebagai mesin penciptaan uang dan pelipatgandaan modal.

   b. Keberpihakan semu kepada masyarakat.

      Bentuk dari keberpihakan ini adalah dalam bentuk empati, simpati dan berbagai partisipasi kepada masyarakat, namun ujung-ujungnya adalah juga untuk menjual berita demi kepentingan kapitalis.

   c. Keberpihakan kepada kepentingan umum.

      Bentuk keberpihakan kepada kepentingan umum dalam arti sesungguhnya sebenarnya adalah visi setiap media massa,

namun akhir-akhir ini visi tersebut tak pernah menunjukkan jati dirinya, namun slogan-slogan tentang visi ini tetap terdengar.

Jadi, dalam menyiapkan materi konstruksi, media massa memposisikan diri pada tiga hal tersebut di atas, namun pada umumnya keberpihakan pada kepentingan kapitalis menjadi sangat dominan mengingat media massa adalah mesin produksi kapitalis yang mau ataupun tidak harus menghasilkan keuntungan.

2. Tahap sebaran konstruksi

Sebaran konstruksi media massa dilakukan melalui strategi media massa. Konsep konkret strategi sebaran media massa masing-masing media berbeda, namun prinsip utamanya adalah *real time*. Media cetak memiliki konsep *real time* terdiri dari beberapa konsep hari, minggu atau bulan, seperti terbitan harian, terbitan mingguan atau terbitan beberapa mingguan atau bulanan. Walaupun media cetak memiliki konsep *real time* yang sifatnya tertunda, namun konsep aktualitas menjadi pertimbangan utama sehingga pembaca merasa tepat waktu memperoleh berita tersebut.

Pada umumnya sebaran konstruksi sosial media massa menggunakan model satu arah, dimana media menyodorkan informasi sementara konsumen media tidak memiliki pilihan lain kecuali mengonsumsi informasi itu. Prinsip dasar dari sebaran konstruksi sosial media massa adalah semua informasi harus sampai

pada pembaca secepatnya dan setepatnya berdasarkan pada agenda media. Apa yang dipandang penting oleh media menjadi penting pula bagi pembaca.

3. Tahap pembentukan konstruksi realitas

   a. Tahap pembentukan konstruksi realitas

      Tahap berikut setelah sebaran konstruksi, dimana pemberitaan telah sampai pada pembaca yaitu terjadi pembentukan konstruksi di masyarakat melalui tiga tahap yang berlangsung secara generik. 1) konstruksi pembenaran sebagai suatu bentuk konstruksi media massa yang terbangun di masyarakat yang cenderung membenarkan apa saja yang ada (tersaji) di media massa sebagai sebuah realitas kebenaran. Dengan kata lain, informasi media massa sebagai otoritas sikap untuk membenarkan sebuah kejadian. 2) kesediaan dikonstruksi oleh media massa, yaitu sikap generik dari tahap pertama. Bahwa pilihan seseorang untuk menjadi pembaca media massa adalah karena pilihannya untuk bersedia pikiran-pikirannya dikonstruksi oleh media massa. 3) menjadikan konsumsi media massa sebagai pilihan konsumtif, dimana seseorang secara kebiasaan tergantung pada media massa. Media massa adalah bagian kebiasaan hidup yang tak bisa dilepaskan. Pada tingkat tertentu, seseorang merasa tak mampu beraktivitas apabila ia belum membaca koran.

b. Pembentukan konstruksi citra

Pembentukan konstruksi citra bangunan yang diinginkan oleh tahap konstruksi. Dimana bangunan konstruksi citra yang dibangun oleh media massa ini terbentuk dalam dua model: 1) model *good news* dan 2) model *bad news*. Model *good news* adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi suatu pemberitaan sebagai pemberitaan yang baik. Pada model ini objek pemberitaan dikonstruksi sebagai sesuatu yang memiliki citra baik sehingga terkesan lebih baik dari sesungguhnya kebaikan yang ada pada objek itu sendiri. Sementara, pada model *bad news* adalah sebuah konstruksi yang cenderung mengkonstruksi kejelekan atau cenderung memberi citra buruk pada objek pemberitaan sehingga terkesan lebih jelek, lebih buruk, lebih jahat dari sesungguhnya sifat jelek, buruk, dan jahat yang ada pada objek pemberitaan itu sendiri.

4. Tahap konfirmasi

Konfirmasi adalah tahapan ketika media massa maupun pembaca memberi argumentasi dan akuntabilitas terhadap pilihannya untuk terlibat dalam tahap pembentukan konstruksi. Bagi media, tahapan ini perlu sebagai bagian untuk menjelaskan mengapa ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial. Ada beberapa alasan yang sering digunakan dalam konfirmasi ini yaitu:

a. Kehidupan modern menghendaki pribadi yang selalu berubah dan menjadi bagian dari produksi media massa.
b. Kedekatan dengan media massa adalah *life style* orang modern, dimana orang modern sangat menyukai popularitas terutama sebagai subjek media massa itu sendiri.
c. Media massa walaupun memiliki kemampuan mengkonstruksi realitas media berdasarkan subyektivitas media, namun kehadiran media massa dalam kehidupan seseorang merupakan sumber pengetahuan tanpa batas yang sewaktu-waktu dapat diakses. (Bungin, 2008:195).

2.1.12. Konsep *Framing*

Menurut Sudibyo dalam Sobur. Pada awalnya *framing* dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana, serta menyediakan kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Konsep ini kemudian dikembangkan lebih jauh lagi oleh Ervin Goffman pada tahun 1974. Goffman mengandaikan *framing* sebagai kepentingan-kepentingan perilaku (*strips of behaviour*) yang membimbing individu dalam membaca realitas.

Konsep *framing* kini telah digunakan secara luas dalam literatur ilmu komunikasi untuk mengambarkan proses penyeleksian dan penyorotan aspek-aspek khusus sebuah realitas oleh media massa. Namun konsep *framing* atau *frame* sendiri sebenarnya bukan murni konsep ilmu

komunikasi, tapi dipinjam dari ilmu kognitif (psikologis). Oleh karena itu menurut Sudibyo konsep *framing* dalam studi media massa banyak mendapat pengaruh dari lapangan psikologi dan sosiologi.

Dalam ilmu komunikasi, konsep *framing* sering digunakan untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media massa. *Framing* dapat dipandangan sebagai penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga isu-isu tertentu mendapat alokasi lebih besar dari isu yang lain. Dengan kata lain analisis *framing* dapat dipakai untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandangan yang digunakan oleh wartawan atau media massa saat mengkonstruksi fakta, yaitu dengan mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan pertautan fakta kedalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti agar lebih diingat, untuk mengiringi interpretasi khalayak sesuai pespektifnya. (Sobur, 2009:162).

Gamson dan Modigiani menyebut cara pandang media massa atau wartawan itu sebagai kemasan (*package*) yang mengandung konstruksi makna atas peristiwa yang diberitakan. Menurut mereka *frame* adalah cara bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Berdasarkan konsep psikologi, *framing* dilihat sebagai penempatan informasi dalam konteks yang unik sehingga elemen-elemen tertentu suatu isu memperoleh kognitif individu lebih besar.

Konsekuensinya, elemen-elemen yang terseleksi menjadi penting dalam mempengaruhi penilaian individu dalam penarikan kesimpulan.

Menurut Ervin Goffman, secara sosiologis konsep *frame* analisis memelihara kebiasaan kita mengklasifikasi, mengorganisasi dan interpretasi secara aktif pengalaman pengalaman hidup kita agar dapat dipahami. Skema interpretasi itu disebut *frames*, yang memungkinkan individu dapat melokalisasi, merasakan, mengidentifikasi dan memberi label terhadap peristiwa-peristiwa serta informasi. (Sobur, 2009:163).

Tood Gitlin mendefinisikan *frame* dengan konsep yang sama, sebagai seleksi penegasan dan ekslusi yang ketat. Ia menghubungkan konsep itu dengan proses memproduksi wacana berita dengan mengatakan, *frame* memungkinkan para jurnalis memproses sejumlah besar informasi secara cepat dan rutin, sekaligus mengemas informasi demi penyiaran yang efisien kepada khalayak menurut Gitlin, *frame* adalah bagian yang pasti hadir dalam praktek jurnalistik. Dengan mengutip Ervin Goffman, ia menegaskan bagaiman *frame* media/wartawan tersebut terbentuk. Menurutnya *frame* media/ wartawan tidak beda jauh dengan *frame* kehidupan sehari-hari yang sering kali kita lakukan. Kita bisa membingkai dan membungkus realitas dalam suatu aturan tertentu, kemasan tertentu dan menyederhanakannya serta memilih apa yang tersedia dalam pikiran dan tindakan. (Sobur, 2009:163 dan Eriyanto, 2002 68:69).

Ada beberapa definisi mengenai *framing* yang disampaikan oleh berbagai ahli. Definisi *framing* tersebut dapat dilihat pada Tabel 2.4:

Tabel 2.4

Definisi *Framing*

Robert M. Entman	Proses seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia juga menyertakan penempatan informasi informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapat alokasi lebih besar dari sisi lain.
William A. Gamsom	Cara bercerita atau gugusan ide ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan kontruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu terbentuk dalam sebuah kemasan (*package*). Kemasan itu semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan idndividu untuk mengkontruksi makna pesan-pesan yang ia terima.
Todd Gitiin	Strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak menonjol dan menarik perhatian khalayak pembaca. Itu dilakukan dengan seleksi, pengulangan, penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.
David E. Snow and Robert Benford	Pemberian makna untuk menafsirkan peristiwa dan kondisi yang relevan. *Frame* mengorganisasikan sistem kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, sumber informasi dan kalimat tertentu.
Amy Binder	Skema interpretasi yang digunkan oleh individu untuk menempatkan, menafsirkan, mengidentifikasi, dan membeli peristiwa secara langsung atau tidak langsung. *Frame* mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan pola yang mudah dipahami dan membantu individu untuk mengerti makna peristiwa.
Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki	Strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, dan hubungan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita.

Sumber: Eriyanto. 2002. Analisis Framing: Kontruksi, ideologi dan politik media. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.

Bentuk penonjolan tersebut bisa beragam. Menempatkan aspek informasi lebih menonjol dibandingkan yang lain, lebih mencolok, melakukan pengulangan informasi yang dipandang penting atau dibungkam dengan aspek budaya yang akrab di benak khalayak. Dengan bentuk seperti itu, sebuah ide atau informasi lebih mudah terlihat, lebih mudah diperhatikan, diingat dan ditafsirkan karena berhubungan dengan skema pandangan khalayak. Karena kemenonjolan adalah produk interaksi antara teks dan penerima, kehadiran *frame* dalam teks bisa jadi tidak seperti yang dideteksi oleh peneliti, khalayak sangat mungkin mempunyai pandangan apa yang dia pikirkan atas suatu teks dan bagaimana teks berita tersebut dikonstruksi dalam pikiran khalayak. (Eriyanto, 2002:186)

Framing memberikan tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh pembuat teks. Kata penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan membuat informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diinget khalayak. Informasi yang menonjol lebih diterima oleh khalayak.

Tahap awal *framing* tidak dilakukan oleh media. Manusia memiliki kemampuan untuk menafsirkan realitas yang terjadi di sekitarnya berdasarkan *frame of reference* dan *field of experience* yang dimilikinya. Eriyanto menyatakan, ada empat hal yang dilakukan manusia ketika menyusun bingkai konstruksi realitasnya sendiri, yaitu:

1. Simplifikasi

   Manusia cenderung memandang segala peristiwa melalui kerangka berpikir yang sederhana, sesuai dengan tingkat kemampuan berpikirnya. Seiring dengan bertambahnya usia, pengetahuan, dan pengalaman, manusia akan memandang dunia secara lebih beragam. Namun tetap saja proses pemahaman realitas akan dilakukan secara sederhana.

2. Klasifikasi

   Manusia menyadari bahwa dunia terdiri dari berbagai hal, sehingga secara psikologis manusia akan memisahkan hal-hal tersebut ke dalam beberapa kategori untuk memudahkan proses pemahaman. Manusia melekatkan ciri-ciri tertentu pada sebuah kategori tertentu, sehingga segala peristiwa yang terjadi dapat terlihat perbedaan-perbedaannya.

3. Generalisasi

   Klasifikasi membantu manusia melihat ciri-ciri peristiwa atau individu. Generalisasi merupakan kelanjutan dari proses tersebut, yang pada akhirnya membatasi ciri-ciri yang berdekatan atau mirip pada ciri-ciri yang didapat pada klasifikasi. Hal ini dapat menghasilkan prasangka.

4. Asosiasi

   Suatu peristiwa tidak hanya diidentifikasi atau dipahami, tetapi selanjutnya dihubungkan dengan peristiwa- peristiwa lain.

Keragaman dunia dianggap memiliki keterkaitan satu dengan lainnya.

Menurut Eriyanto, dalam buku Analisis *Framing*:

> "*Framing* adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. Dalam konsepsi Entman, *framing* pada dasarnya merujuk pada pemberitaan definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan". (Eriyanto, 2002:188).

Eriyanto juga menyebutkan *framing* sebagai berikut:

> "*Framing* adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Penyajian tersebut dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu dan membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas peristiwa. Di sini media menyeleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak, *framing* membuat dunia lebih diketahui dan dimengerti. Realitas yang kompleks dipahami dan disederhanakan dalam kategori tertentu, bagi khalayak, penyajian realitas yang demikian, membuat realitas lebih bermakna dan dimengerti. Selain menonjolkan bagian dan aspek tertentu untuk mempermudah khalayak mengenal sebuah realitas. *Framing* juga merupakan pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan dan redaksi. Yang pada akhirnya menentukan fakta mana yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan atau dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita tersebut. *Framing* seperti yang dikatakan Todd Gitlin, adalah sebuah strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak pembaca". (Eriyanto, 2002:67-68).

Frame berita dibentuk dari kata kunci, metafora, konsep, simbol, citra yang ada dalam narasi berita. Karena, *frame* dapat dideteksi dan diselidiki dari kata, citra dan gambar tertentu yang memberikan makna

dari teks berita. *Frame* berita timbul dalam dua level. Menurut Eriyanto dalam buku analisis *framing*, Pertama, konsepsi mental yang digunakan untuk memproses informasi dan sebagai karakteristik dari teks berita. Kedua, perangkat spesifik dari narasi berita yang dipakai untuk membangun pengertian mengenai peristiwa. Kosa kata dan gambar itu ditekankan dalam teks sehingga lebih menonjol dibanding bagian lain dalam teks. Itu dilakukan lewat pengulangan, penempatan yang lebih menonjol atau menghubungkan dengan bagian lain dalam teks berita. Sehingga bagian itu lebih menonjol, dilihat, dan lebih mempengaruhi khalayak. Secara luas pendefinisian masalah ini menyertakan, di dalamnya, konsepsi dan skema interpretasi wartawan. Pesan, secara simbolik menyertakan sikap dan nilai. Ia hidup membentuk, dan menginterpresentasikan makna di dalamnya.

2.2. Kerangka Pemikiran

Realitas sosial tidak berdiri sendiri tanpa kehadiran individu, baik di dalamnya maupun di luar realitas tersebut. Realitas sosial itu memiliki makna, manakala realitas sosial dikonstruksi dan dimaknakan secara subyektif oleh individu lain sehingga memantapkan realitas itu secara obyektif. Individu mengkonstruksi realitas sosial, dan merekonstruksinya dalam dunia realitas, memantapkan realitas itu berdasarkan subjektivitas individu lain dalam institusi sosialnya. Paradigma konstruktivis menjelaskan bahwa realitas merupakan konstruksi sosial yang diciptakan oleh individu. Akhirnya, dalam pandangan

paradigma definisi sosial, realitas adalah hasil ciptaan manusia kreatif melalui kekuatan konstruksi sosial terhadap dunia sosial di sekelilingnya.

Ide dasar semua teori dalam paradigma definisi sosial sebenarnya memiliki pandangan bahwa manusia adalah aktor yang kreatif dari realitas sosial. Artinya, tindakan manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma-norma, kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, dan sebagainya, yang kesemuanya itu tercakup dalam fakta sosial. (Bungin, 2008:11).

Bungin dalam bukunya "Konstruksi Sosial Media Massa" yang mengutip dari Berger dan Luckman menjelaskan bahwa:

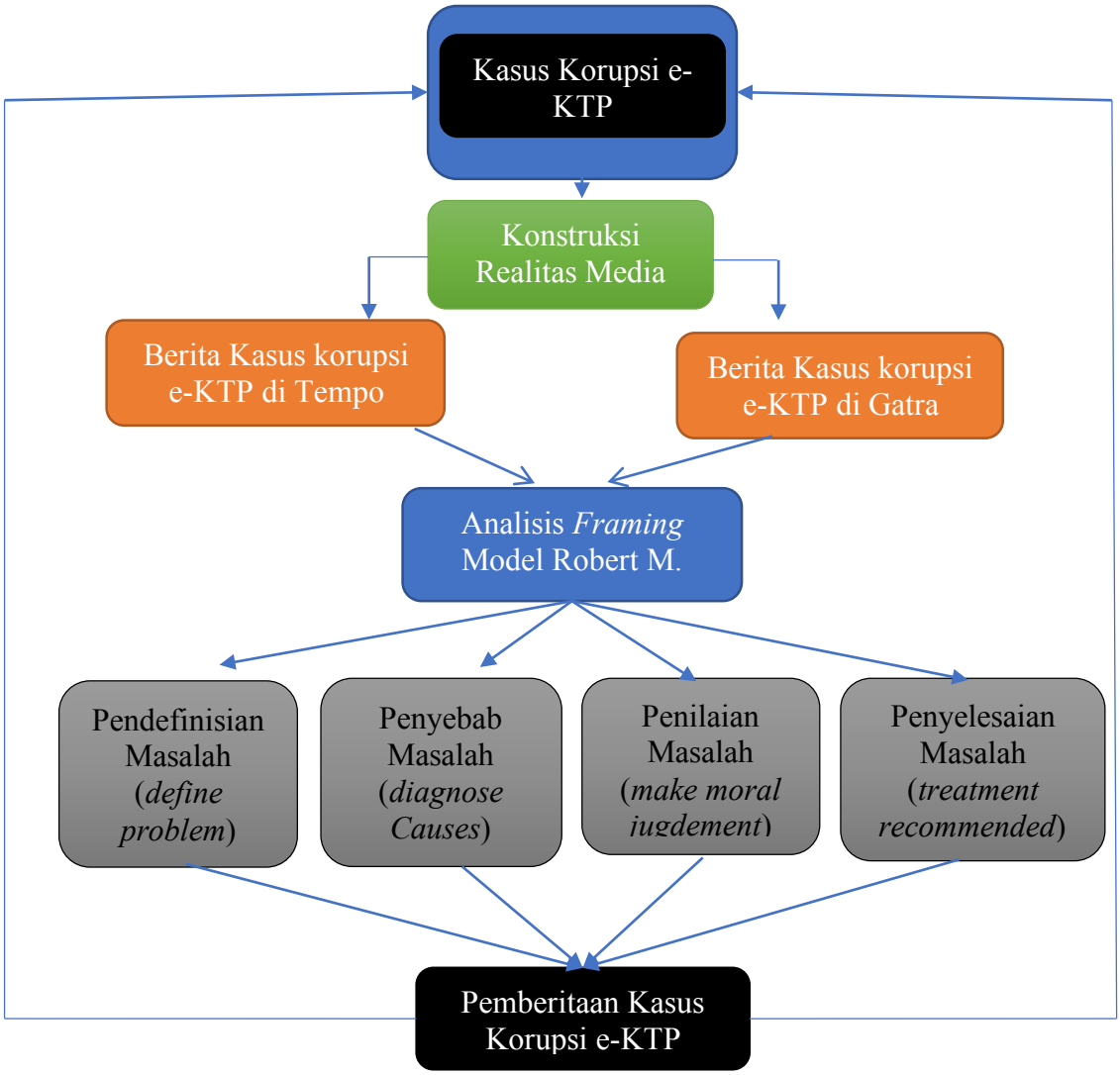
> "Konstruksi sosial adalah sebuah proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang terjadi antara individu di dalam masyarakat. Ketiga proses tersebut terjadi secara simultan membentuk dialektika, serta menghasilkan realitas sosial berupa pengetahuan umum, konsep, kesadaran umum, dan wacana publik. Konstruksi sosial dibangun oleh individu dan masyarakat secara dialektika. Dan yang dimaksud konstruksi sosial itu adalah realitas sosial yang berupa realitas obyektif, subyektif, maupun simbolis". (Bungin, 2008:212).

Atas dasar pemikiran semacam itulah kaum konstruksionis memiliki pandangan tersendiri dalam melihat wartawan, media dan berita. Konsep mengenai konstruksionisme ini diperkenalkan oleh Peter L.Berger dan Luckmann melalui "*The* Sosial *Construction of Reality*, *A Treatise in the Sociological of Knowledge*" (1966). Ia menggambarkan proses sosial melalui tindakan dan interaksinya, di mana individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. (Bungin, 2008:13).

Dalam penelitian ini penulis mengambarkan kerangka pemikiran yang akan peneliti teliti dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut ini:

Gambar 2.1

Alur Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti, 2017

Dari gambar skema kerangka pemikiran diatas, dapat digambarkan kerangka pemikiran yang akan peneliti lakukan dalam penelitian ini. Adapun penjelasan mengenai gambar diatas adalah sebagai berikut:

1. Kasus korupsi e-KTP merupakan sebagai bahan informasi yang sangat menarik dan menjadi objek dalam penelitian ini dalam sebuah

pemberitaan yang akan ditulis oleh para wartawan. Tempo dan Gatra memang telah memberitakan kasus e-KTP sebelumnya. Peneliti memilih berita ini karena pada saat itu berita yang peneliti ambil merupakan berita yang terbaru. Lalu, minggu kemudiannya berita e-KTP ini dikesampingkan diganti oleh kasus Novel Baswedan. Peneliti juga menyeleksi berita yang akan diteliti. Kriteria berita yang peneliti pilih adalah berita yang memiliki unsur analisis dari model Robert M. Entman.

2. Konstruksi realitas media massa sebagai teori atau kerangka pemikiran teoritis dasar pada analisis *framing* dalam penelitian ini.
3. Pemberitaan Kasus korupsi e-KTP melalui proses konstruksi dari penonjolan berita, dimana pada proses ini penelitian untuk mengetahui kebijakan media cetak Majalah Tempo dan Majalah Gatra melalui analisis teknik *framing* dari Robert M. Entman, dengan membagi empat elemen identifikasi masalah sebagai berikut:
    1. Pendefinisian masalah (*define problem*)
    2. Penyebab masalah (*diagnose causes*)
    3. Penilaian masalah (*make moral judgement*)
    4. Penyelesaian masalah (*teratment recommendation*)
4. Hasil akhir menjadi bagaimana pemberitaan tentang Kasus Korupsi e-KTP yang disajikan oleh Majalah Tempo dan Majalah Gatra.

Dalam sudut pandang konstruksionis, media massa terus menerus melaksanan proses penyampaian pesan berupa berita, sebagai sebuah realitas yang

dikonstruksikan kembali. Dalam hal ini, media massa akan mengkonstruksikan berbagai peritiwa yang acak dan kompleks untuk disusun kembali ke dalam sebuah berita. Poroses kostruksi berita itu sendiri dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal antara lain ideologi, teknik, kepercayaan, kepentingan pada tingkat perorangan atau kelompok, juga struktur organisasi media tersebut. Sedangkan yang termasuk dalam faktor eksternal antara lain sistem politik, ekonomi, maupun sosiokultural.

Faktor-faktor tersebut, yang memengaruhi proses konstruksi berita, tidak mengherankan bila akhirnya sebuah peristiwa diberitakan dengan cara maupun sudut pandang yang berbeda oleh media massa yang berbeda pula. Namun, sebelum sampai pada tingkat media massa, proses mengkonstruksikan kembali tersebut sebelumnya akan dilakukan oleh wartawan. Wartawan bisa menyajikan realitas secara benar, kalau ia bertindak profesional dengan menyingkirkan keberpihakannya.

> Kaum konstruksionis menilai, wartawan tidak bisa menyembunyikan pilihan moral dan keberpihakannya, karena merupakan bagian yang instrinsik dalam pembentukan berita. Realitas tercipta dari proses konstruksi melalui sudut pandang tertentu dari wartawan. Konstruksi wartawan ini sendiri dipengaruhi oleh makna, interpretasi dah hasil relasi antara individu dan objek. (Eriyanto, 2002:28).

Wartawan dan media massa terus menerus melakukan proses konstruksi terhadap realitas, maka produk yang dihasilkan, yaitu berita, hanyalah sebuah konstruksi dari realitas. Dalam sebuah media, terdapat penonjolan dalam satu sisi tertentu pada suatu peristiwa dan mengesampingkan sisi lainnya. Dengan demikian, media massa telah melakukan sebuah pembingkaian terhadap suatu peristiwa sehingga menghasilkan berita/potret yang memiliki makna tertentu.

Proses mengkonstruksi realitass dan menyajikannya kembali melalui media massa oleh wartawan disebut pembingkaian (*framing*). Oleh karena itu, analisis pembingkaian merupakan cara untuk membedah sejauh mana sebuah realitas dikonstruksikan dan disajikan kembali.

Pemberitaan kasus korupsi e-KTP dalam Majalah Tempo dan Majalah Gatra mempunyai pandangan yang berbeda dari setiap pemberitaan yang dipublikasikan dalam kurun waktu tertentu dimana kecenderungan isi teks berita yang diberitakan. Tempo dan Gatra sudah tentu akan melakukan proses konstruksi realtas tersebut. Sebagai sebuah media massa yang merekam sebuah peristiwa, Tempo dan Gatra akan melakukan pembingkain berita kasus korupsi e-KTP dengan menonjolkan aspek tertentu dan mengesampingkan asepek lainnya.

Berita-berita yang disajikan di media massa merupakan hasil dari sebuah konstruksi yang menghasilkan suatu pembingkaian serta memiliki kecenderungan untuk mengesampingkan aspek yang satu dengan yang lainnya, media massa juga tidak bisa terlepas begitu saja dari prinsip-prinsip jurnalisme yang ada. Bill dan Kovach dan Tom Rosenstiel dalam buku mereka yang berjudul Elemen-elemen Jurnalisme mengungkapkan adanya prinsip-prinsip tertentu yang seharusnya diharapkan publik.

Dalam penelitian ini berita yang dianggap penting oleh dalam Majalah Tempo dan Majalah Gatra dianalisis dalam pembingkaian berita menurut Robert Entman. Dalam konsepnya dijelaskan dan dianalisis dari segi pendefinisian masalah (*defines problems),* memperkirakan penyebab masalah (*diagnoses*

causes), penilaian moral (*make moral judgement*), dan penekanan penyelesaian masalah (*treatment recomendation*).